



KLIPING DIGITAL

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KUMPULAN BERITA MEDIA CETAK



SUHATRI BUR, SE, MM
BUPATI PADANG PARIAMAN

Drs. RAHMANG, MM
WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN



Melahirkan Generasi Bangsa Berkualitas Bupati 1.074 PPPK Terima SK Pengangkatan

PDG. PARIAMAN, METRO

Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyatakan sebanyak 1074 orang guru se Kabupaten Padangpariaman diserahkan Surat Keterangan (SK) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Semoga para guru yang dilantik dapat melahirkan generasi generasi berkualitas .

"Kita sekarang mengambil sumpah sebanyak 1.074 guru seKabupaten Padangpariaman yang menerima SK PPPK. Sejalan dengan itu juga diambil sumpah sebagai PPPK formasi 2023," kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin, usai penyerahan SK tersebut.

Suhatri Bur mengucapkan selamat dan tahniah kepada para guru yang telah menerima SK PPPK. "Semoga semua

guru yang diambil sumpahnya ini menjadi seorang guru yang disukai murid dan siswa siswinya," ungkapnya.

Katanya, atas nama Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, ia mengucapkan selamat kepada para guru PPPK yang baru saja disetahkan SK PPPK ini dengan jumlah SK fungsional guru formasi tahun 2023 sebanyak 1.074.

"ASN sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat, kami berharap bisa melaksanakan tugas dengan baik di lingkungan sekolahnya masing masing. Sehingga lahir anak didiknya masing masing yang dapat membanggakan daerah dan ke dua orang tuanya," ujarnya.

Bahkan katanya, kalau telah demikian mereka dapat membantu Pemkab Padang-



efi/nurza/posmetro

FOTO BERSAMA—Bupati Suhatri Bur foto bersama dengan tenaga guru PPPK usai diambil sumpah dan penyerahan SK.

pariaman dalam melaksanakan program strategis khususnya di bidang pendidikan, untuk meningkatkan Sumber-Daya Manusia (SDM)yang mampu berdaya saing, unggul, sehat, cerdas, beriman dan bertaqwa.

"Kita berharap kepada se-

mua tenaga pengajar yang dilantik sekarang ini dapat melaksanakan sesuai dengan Undang Undang yang ada. Dengan demikian program Padangpariaman beraya berjalan dengan baik ditengah tengah masyarakat," tandasnya mengakhiri.(efa)



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KHAZANAH

Senin 02 Oktober 2023

Parit Malintang, Khazanah — Akses jalan tol Padang-Kapalo Hilalang di Tarok City yang beberapa hari lalu ditutup masyarakat setempat telah dibuka kembali dan warga yang mengaku memiliki bidang jalan tersebut, sepakat diukur ulang dan akan dicocokkan dengan peta bidang tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya.

"Warga atas nama Febri pemilik tanah Silvia Cs telah sepakat untuk ukur ulang kembali sehingga jelas batas tanahnya. Tim Satgas A dari BPN telah mengukur titik kordinat dan akan dicocokkan dengan peta bidang tanah yang telah diganti rugi oleh Pemda Padang Pariaman," kata Ketua Lapangan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Padang-Kapalo Hilalang Drs. H. Syafrizal Ukok, MM Datuak Nan Batuah di Tarok City, Jum'at (29/9).

Langkah ukur ulang ini, tambahnya, ditempuh untuk memberikan keadilan dan transparansi kepada pihak Silvia Cs. Hal ini sesuai dengan keputusan Rapat Tim Percepatan pada Rabu 27 September 2023 yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.

Kesepakatan lain yang dicapai adalah, tidak ada tindakan anarkis di lapangan seperti penutupan akses dan pengrusakan aset. Jika ada warga yang keberatan terhadap proses pembebasan lahan tol ruas Padang-Kapalo Hilalang ini dapat diajukan kepada Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol.

"Warga sudah sepakat memberikan akses sepenuhnya untuk kelancaran pekerjaan konstruksi jalan tol Padang-Padang-Kapalo Hilalang yang tengah berjalan, sehingga proyek strategis nasional (PSN) ini lancar dan tidak terganggu," kata Syafrizal Ukok Datuak Nan Batuah.

Keberatan pemilik tanah di gerbang Tarok City ini diawali klaim dari Silvia Cs yang mengaku tanahnya belum diganti rugi oleh Pemda Padang Pariaman. Tanah itu berupa jalan yang telah dimanfaatkan masyarakat sebelum adanya akses Tarok City. Karena belum diba-

yar, pihak Silvia Cs menutup jalan akses tol, sehingga pekerjaan menjadi terganggu.

Sebaliknya pihak Pemda Padang Pariaman mengaku telah mengganti rugi bidang jalan tersebut pada saat pembukaan Tarok City. Bidang jalan itu diklaim masuk dalam sertifikat tanah hak milik Heni Susinto.

Karena tak kunjung mencapai titik temu, maka Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Padang-Kapalo Hilalang mengambil alih masalah ini, dengan keputusan mengukur ulang kembali bidang tanah yang diklaim oleh Silvia Cs.

Hasil ukur ulang lapangan ini akan dirapatkan oleh Tim Percepatan dipimpin Wagub Audy Joinaldy dengan pihak-pihak yang mengklaim pada tanggal 2 Oktober 2023 di Kantor Gubernur Sumbar.

Dalam kegiatan ukur ulang tanah di gerbang Tarok City ini dihadiri Asisten I Pemda Padang Pariaman Rudi Rahmat, SE., Kasubdit Pam Obvit Polda Sumbar AKBP Sumintak, Kepala Satpol PP Padang Pariaman Syofrion, M.Si., Kadis Lingkungan Hidup Suhardi, Intelkam Polda Iptu Nirdes Ali, SH.MH., Kasat Intelkam Polres Padang Pariaman Iptu Yudson, Pengacara Silvia Cs Tito, SH., Kapolsek Kayu Tanam Iptu Feri Yuzaldi, Camat Kayu Tanam, Ketua KAN, dan Penghulu Taufik Isra Datuak Rangkayo Mulie.

Dari pihak pelaksana pembangunan jalan tol hadir Sri Hastuti Hardiningsih

Project Director PT Hutama Karya Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Lubuk Alung-Padang, General Superintendent PT HKI Tomy Herlambang, Construction Manager PT HKI Rizzal Afandi dan Humas PT HKI Andi Prahm.

Jalan tol Padang-Kapalo Hilalang yang panjangnya 36,6 Km ini pengadaan tanahnya sudah hampir tuntas. Dalam rapat terakhir Tim Percepatan disampaikan sudah 97 persen. Sisanya beberapa bidang masih belum UGK, sedang diajukan SPP, dan konsinyasi di PN Pariaman. (ist)



PENGERJAAN LEWAT LIMIT WAKTU

Proyek Cekdam di Sungai Limau Terancam

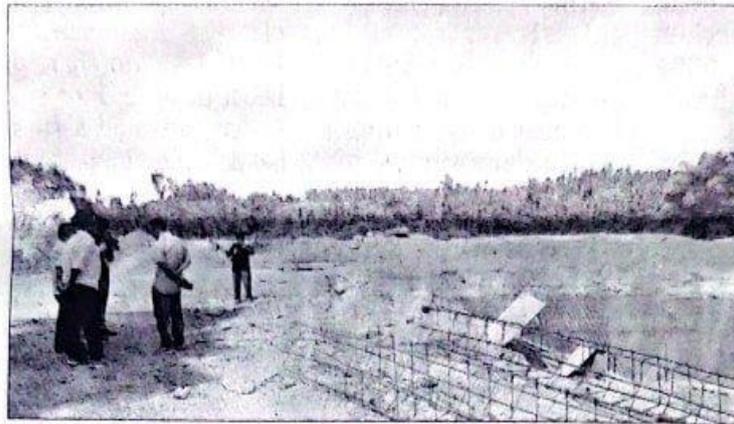
Padang Pariaman, Khazanah - Proyek Pekerjaan Penataan Sistem Penanggulangan Bencana, Rekonstruksi Bendung/Cekdam di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan tahun 2023.

Dari hasil penelusuran di lokasi progres pekerjaan minus. Proyek tahun 2023 itu sejatinya masa kontraknya sudah habis pada akhir Desember ini.

Proyek bernomor kontrak 02/SPK-BPBD/TV-2023, tanggal kontrak 6 April 2023 dengan pelaksana PT Suci Esalestari asal Kota Pekanbaru (Riau) dengan sumber anggaran APBD di daerah itu senilai Rp15,7 miliar, hingga saat ini September 2023 progres pekerjaan diduga belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dengan waktu pelaksana 240 hari kalender telah berjalan 6 bulan atau 180 hari terhitung sejak tanggal 6 April 2023, sehingga proyek BPBD Padang Pariaman hanya menyisihkan waktu pelaksanaan 60 hari.

Diketahui, pihak kontraktor telah mendapatkan Show Cause Meeting (SCM) yang ketiga. Karena diduga kontraktor pelaksana telah lalai dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga bobot pekerjaan tidak sesuai dengan limit waktu



Inspektorat bersama PPK saat meninjau Proyek Cekdam Sungai Limau, Rabu (27/9)

pelaksana alias mengalami keterlambatan (Deviasi).

Terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek tersebut, mengundang keprihatinan kalangan Legislatif di daerah itu. Keterlambatan tersebut dinilai merugikan Pemkab dan masyarakat, karena pekerjaan menjadi tertunda dan berdampak ke pada masyarakat sekitar proyek itu.

Ketua DPRD Padang Pariaman Arwinsyah menyebutkan kasus keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek Cek Dam yang dilaksanakan oleh rekanan itu masih dalam penangangan dari tim pemerintah daerah setempat.

"Artinya dari hasil pemeriksaan akhir yang dilakukan oleh tim pemerintah daerah, bobot pekerjaan masih minim, dan waktu pelaksana mengalami keterlambatan. Bahkan tim pemkab mengeluarkan SCM yang ketiga," sebut

Arwinsyah Kamis (18/9) di Rumah Dinas Ketua DPRD di daerah itu.

Kejadian seperti ini sangat memprihatinkan, ini preseden buruk bagi pembangunan daerah. Padahal, untuk mendapatkan proyek ini tidak mudah, makanya proyek ini masuk dalam proyek skala prioritas yang harus rampung Desember 2023 ini.

"Apapun kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah setempat, bagi saya, proyek tersebut tetap terlaksana dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," sebut dia.

Oleh karena itu, lanjut Arwinsyah, dari Partai Gerindra ini bersikukuh kepada eksekutif agar proyek tersebut tetap dilanjutkan. Artinya, tidak ada istilah mangkrak atau dihentikan.

Sementara Suci Manager PT Suci Esalestari sebagai pe-

laksana proyek menyebutkan, dirinya merasa dirugikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) daerah setempat.

"Saya bekerja secara profesional, dalam pengerjaan proyek ini kita telah melakukan proses yang ada dalam aturan yang berlaku. Namun dalam hal ini, pihak PPK seakan-akan mempersulit saya. Sehingga saya dirugikan secara waktu dan finansial," sebut Suci ketika dihubungi melalui ponselnya.

Terkait hal ini, dirinya meminta pendampingan hukum 'Legal Assistance' ke Kejaksaan Negeri Pariaman agar realisasi pembangunan proyek tersebut dapat berjalan baik, lancar dan maksimal sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dengan adanya SCM itu adalah kewenangan pemerintah. Namun, dirinya dalam hal ini perlu pendampingan hukum guna kejelasan dan penjelasan terhadap pengerjaan proyek tersebut. Selain itu, Pendampingan hukum berujuan untuk terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang bersih

"Saya bukan melakukan pembelaan diri, bagi saya, kebijakan yang dilakukan oleh PPK terhadap diri saya, telah mempersulit dan merugikan saya," sebut Suci. (syafrial suger)